

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan seringkali dikaitkan dengan proses industrialisasi. Proses industrialisasi merupakan satu jalur kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu. Arsyad (2010) menyatakan bahwa pembangunan industri merupakan suatu fungsi dari tujuan pokok kesejahteraan rakyat, bukan merupakan kegiatan yang mandiri untuk hanya sekedar mencapai fisik saja. Sektor industri diyakini sebagai sektor yang dapat memimpin sektor-sektor lain dalam sebuah perekonomian menuju kemajuan (Dumairy, 1996). Produk-produk industrial memiliki "dasar tukar" (term of trade) yang tinggi atau lebih menguntungkan, serta menciptakan nilai tambah yang besar dibanding produk-produk sektor lain. Salah satu tujuan penting dalam pembangunan ekonomi melalui proses industrialisasi adalah penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk mengejar pertumbuhan angkatan kerja yang pertumbuhannya lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu permasalahan utama yang dihadapi sampai dengan saat ini, dan masih belum teratasi adalah relatif masih tingginya angka pengangguran.

Jumlah penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun menyebabkan adanya jumlah angkatan kerja yang semakin meningkat, maka hal ini menyebabkan semakin meningkat jumlah penduduk yang mencari pekerjaan ataupun yang menganggur. Untuk mengimbangi permasalahan tersebut maka perlu adanya perluasan penyerapan tenaga kerja. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith

(1729-1790) juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu (necessary condition) bagi pertumbuhan ekonomi. (Mulyadi, 2003).

Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah atau banyaknya orang yang bekerja di berbagai sektor. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya demografi. Proporsi pekerja menurut lapangan pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Hal ini dapat pula mencerminkan struktur perekonomian suatu wilayah.

Menurut Handoko (1985) penyerapan tenaga kerja sebagai jumlah tertentudari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha. Terjadinya penyerapan tenaga kerja disebabkan oleh adanya permintaan akantenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja.

Perluasan penyerapan tenaga kerja dapat dilakukan dengan pembangunan di sektor industri. Pembangunan sektor industri diarahkan pada peningkatan kemajuan dan kemandirian perekonomian nasional serta kesejahteraan rakyat, memperkokoh struktur ekonomi nasional dan mendorong pengembangan wilayah dan juga pemerataan hasil-hasil pembangunan. sektor industri dianggap sebagai sektor yang mampu menjadi pimpinan sektor lain.

Adapun Produk industri mempunyai nilai jual tinggi dari pada sektor lain. dikarenakan produk industri sangat beragam dan memberikan nilai dan manfaat yang tinggi pada masyarakat. Industri dipercaya menjadi penolong bagi perekonomian negara. Di seluruh dunia, sektor perindustrian sangat berkembang pesat yang dapat dilihat dari kapasitas modal yang tertanam sangat besar, penyerapan tenaga kerja yang besar, dan juga mampu menciptakan nilai tambah (value added creation) dari setiap input.

Menurut Arsyad (2010: 442), sektor industri mempunyai peran sebagai sektor pemimpin (Leading sektor). Dikarenakan dengan adanya pembangunan sektor industri maka akan sanggup mendorong pembangunan di sektor lainnya, seperti sektor pertanian dan sektor jasa, sehingga nantinya akan berpengaruh pada meluasnya lapangan kerja yang akan meningkatkan pendapatan dan permintaan masyarakat (daya beli). Peningkatan terhadap pendapatan dan daya beli masyarakat menggambarkan bahwa perekonomian tumbuh dengan baik. Sektor industri merupakan salah satu sektor ekonomi yang sedang dikembangkan di Indonesia sebagai faktor penggerak kemajuan sektor-sektor ekonomi lainnya. Peran sektor industri dalam perekonomian dinilai penting terutama dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia.

Menurut pandangan Rostow, pada negara-negara berkembang, peranan sektor industri juga menunjukkan kontribusi yang semakin tinggi. Kontribusi yang semakin tinggi dari sektor industri menyebabkan perubahan struktur perekonomian negara yang bersangkutan secara perlahan ataupun secara cepat dari sektor pertanian ke sektor industri. Adanya peningkatan jumlah industri akan menyebabkan penyerapan tenaga kerja juga bertambah. Karena dengan adanya

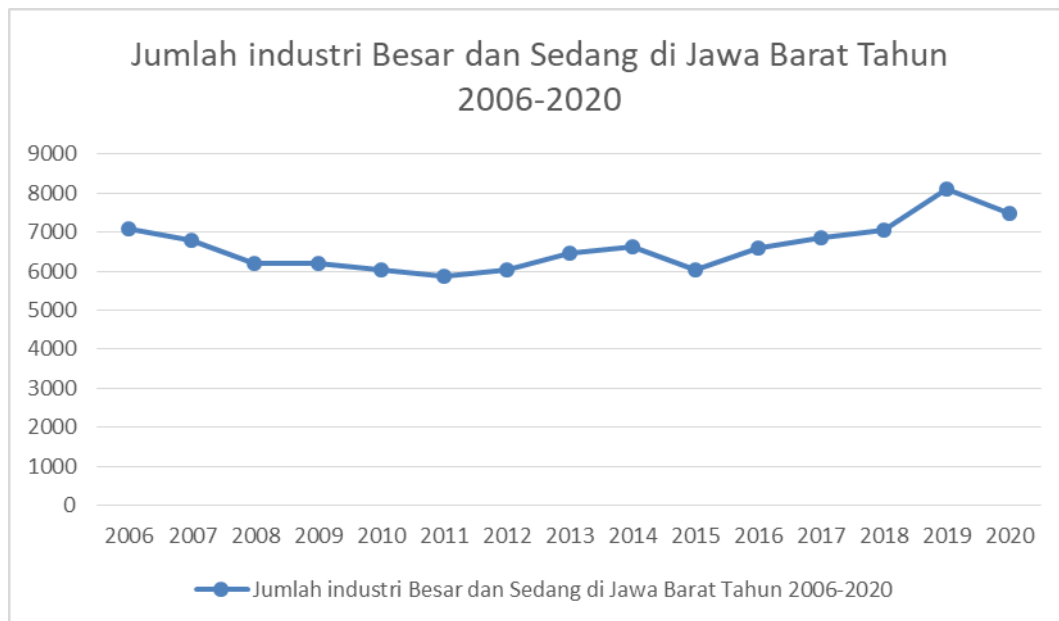
peningkatan jumlah industri maka meningkat pula industri baru yang dibangun dan membutuhkan tenaga kerja baru.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, pemerintah membuat kebijakan salah satunya dengan cara mengedepankan sektor industri. Sektor industri adalah sektor yang saat ini berkontribusi paling besar terhadap pertumbuhan PDB tahunan Indonesia. Keseriusan negara ini dalam menjalankan pembangunan industri dapat dilihat dalam visi pembangunan jangka panjang tahun 2025 yang ditetapkannya yaitu “Membawa Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh Dunia”. Oleh karenanya, sektor industri pengolahan menjadi sektor prioritas dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.

Perkembangan industri melibatkan berbagai penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Indonesia kegiatan pembangunan di tunjang oleh tumbuhnya berbagai industri dengan berbagai jenis kegiatan. Sektor industri merupakan sektor potensial yang memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya negara berkembang. Oleh karena itu sektor-sektor industri kini mulai banyak didirikan di negara negara berkembang salah satunya di Indonesia. Sektor industri sendiri di Indonesia memegang peranan yang sangat penting, selain menjadi penunjang dari kegiatan perekonomian, sektor industri juga pemberi kontribusi terbesar pada PDB Indonesia dibandingkan 12 sektor lainnya.

Peranan besar yang dimiliki sektor industri dikarenakan letak Jawa Barat yang strategis juga infrastruktur yang mendukung mudahnya mobilitas barang membuat menjamurnya pertumbuhan sektor industri di Jawa Barat

Kawasan Jawa Barat juga memiliki peranan penting dalam pertumbuhan industri dan perdagangan mengingat Provinsi Jawa Barat memiliki Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang yang di proyeksikan untuk memperbesar pasar ekspor.



Gambar 1.1 Jumlah Industri Besar dan Sedang di Jawa Barat Tahun 2006-2020 (Unit)

Sumber : BPS, Data Diolah (2022)

Berdasarkan gambar 1.1 jumlah industri dari tahun 2006- 2020 perkembangan industri besar dan sedang yang tercatat dalam direktori industri di Jawa Barat mengalami tren terus meningkat. Pada akhir tahun 2015 tercatat terdapat 6.035 unit perusahaan industri besar dan sedang. Peningkatan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2019 yakni meningkat sebesar 8.099 unit perusahaan dari 2 tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 jumlah industri besar dan sedang di Jawa Barat mengalami penurunan 7.470 unit perusahaan. Penurunan yang dialami tersebut dikarenakan adanya pandemi yang melanda Indonesia pada awal tahun 2020. Sejak awal munculnya pandemi Covid 19 semua sektor industri terkena imbasnya yang

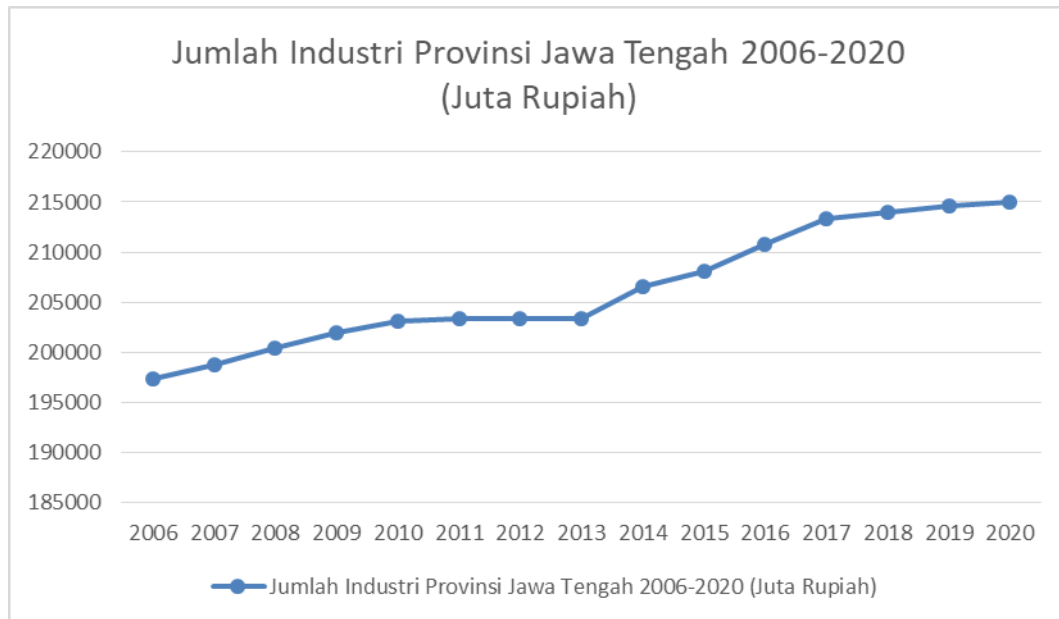
berdampak pada pengurangan tenaga kerja

Karena itu banyaknya jumlah perusahaan atau usaha industri besar dan sedang di Jawa Barat menjadi salah satu faktor untuk menyerap tenaga kerja, namun tergantung kepada jenis perusahaan tersebut. Apabila perusahaan tersebut merupakan perusahaan padat modal, maka banyaknya jumlah perusahaan tidak berpengaruh besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Sebaliknya, apabila perusahaan tersebut merupakan perusahaan padat karya maka akan banyak menyerap tenaga kerja.

Dikutip dari liputan6.com, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan adanya penurunan serapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di masa pandemi Covid-19. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian Eko Cahyanto menyebutkan bahwa, hingga Agustus 2020, penyerapan tenaga kerja di industri pengolahan hanya mencapai 17,48 juta atau sekitar 13,61 persen dari total tenaga kerja nasional. Hal ini dapat memberi gambaran bawa dampak yang ditimbulkan oleh adanya virus covid-19 yang terjadi di Indonesia berdampak sangat besar terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan secara menyeluruh di berbagai wilayah di Indonesia.

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang berkontribusi besar dalam pembentukan PDB nasional. Salah satu yang menjadi keberhasilannya adalah sektor industri di Jawa Barat, sebanyak 60 persen sektor industri pengolahan berlokasi di Jawa Barat. Saat ini Provinsi Jawa Barat merupakan sentra perindustrian nasional. Industri nasional dan multinasional yang berkembang di Jawa Barat adalah industri tekstil dan garmen, elektronik, kulit, pengolahan makanan, furnitur,

pesawat, mobil, panas bumi dan gas, obat-obatan, dan petrokimia. Faktor-faktor pendukung berkembangnya industri di daerah ini adalah sumber daya dan jumlah tenaga kerja yang cukup, infrastruktur yang memadai, pasar yang potensial, serta letak geografisnya yang strategis.



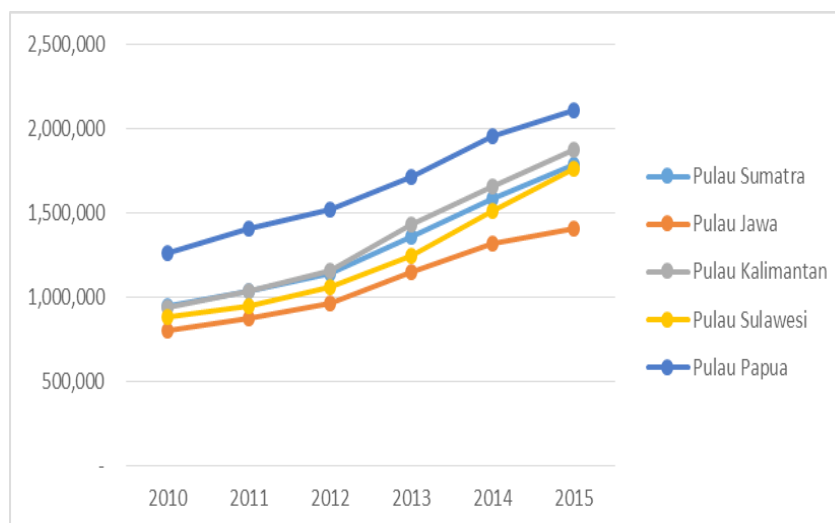
Gambar 1.2 Jumlah industri di Provinsi Jawa Barat Tahun 2006-2020

Sumber : BPS, Jawa Barat Dalam Angka 2006-2020 (diolah)

Pada gambar 1.2 terlihat bahwa jumlah industri Provinsi Jawa Barat tidak selalu berjalan dalam tren yang sama. Bertambahnya jumlah industri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dengan adanya pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerjanya yang selalu mengalami fluktuasi. Dari segi penyerapan tenaga kerja industri akan membawa dampak terhadap laju pertumbuhan yang ada di Provinsi Jawa Barat

Menurut Riky (2012), dan Rio (2014), menyatakan bahwa jumlah industri yang relatif meningkat dalam setiap tahunnya akan memberikan pengaruh dalam memberikan penyerapan tenaga kerja baru, banyak jumlah unit usaha baru akan membutuhkan tenaga kerja baru untuk industrinya.

Menurut Rejekiingsih (2004), menyatakan bahawa penyerapan tenaga kerja akan dipengaruhi oleh jumlah jumlah industri dimana dengan adanya peningkatan jumlah industri maka akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap. Sebaliknya, apabila jumlah industri menurun maka akan terjadi pengangguran Prabowo (1997), menambahkan bahwa semakin banyak jumlah perusahaan atau jumlah industri yang berdiri maka akan semakin mendorong terjadinya penambahan tenaga kerja. Matz (dalam Ariani, 2013), menyatakan bahwa dengan adanya peningkatan jumlah perusahaan maka akan meningkatkan jumlah output yang akandihasilkan. Faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah Upah Minimum Provinsi. Upah Minimum Provinsi di pulau Jawa masih cukup rendah dibandingkan provinsi-provinsi di pulau lain kecuali DKI Jakarta.

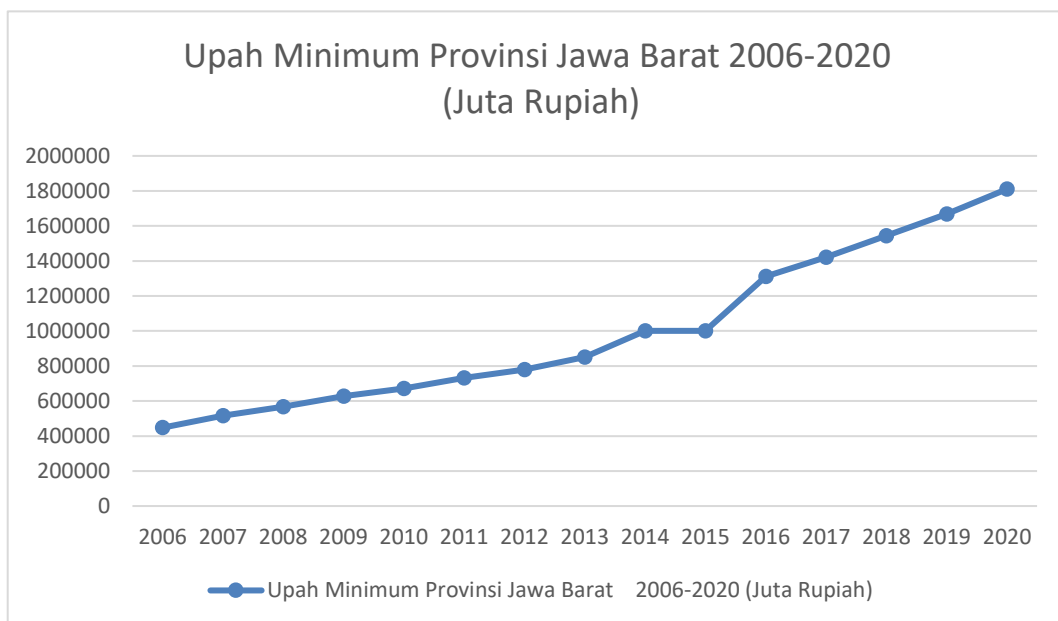


Gambar 1.3 Upah Minimum berdasarkan Pulau di Indonesia Tahun 2010-2015 (Rupiah)

Sumber : BPS (diolah)

Terlihat pada gambar 1.3 Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa terletak di urutan kedua setelah Pulau Sumatra yang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun mulai dari Tahun 2010 sampai Tahun 2015 yang terbilang cukup naik dibanding Pulau Jawa.

Menurut Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor Bm/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019, kenaikan 8,51 persen itu berlaku untuk seluruh provinsi RI. Dalam surat edaran itu juga disebutkan, angka 8,51 persen didasarkan pada data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional 2019. Berikut adalah tabel kenaikan UMP dari seluruh Provinsi di Pulau Jawa.



Gambar 1.4 Upah Minimum Provinsi di Jawa Barat Pada Tahun 2006- 2020 (Juta Rupiah)

Sumber : BPS, Jawa Barat Dalam Angka 2006-2020 (diolah)

Dari gambar 1.4 diatas dapat dilihat bahwa kenaikan upah tertinggi terdapat mulai tahun 2014 adalah sejumlah 1.000.000 rupiah dan ditahun 2019 sejumlah 1.668.373 Sedangkan tingkat upah terendah terdapat pada Tahun 2006 dengan jumlah tingkat upah sejumlah 447.654 rupiah dan ditahun 2020 sejumlah 1.810.351 rupiah. Kenaikan upah yang meningkat setiap tahunnya tersebut terjadi karena biaya hidup layak meningkat akibat harga - harga kebutuhan ekonomi yang selalu

meningkat. Pemerintah berusaha meningkatkan upah minimum dan menyeimbangkan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Kenaikan upah minimum akan meningkatkan biaya perusahaan yang akhirnya berdampak pada kenaikan harga per unit barang yang diproduksi. Kenaikan harga barang ini akan mengurangi permintaan atau konsumsi barang yang berakibat pada banyaknya barang yang tidak terjual, sehingga produsen terpaksa menurunkan jumlah produksinya. Penurunan jumlah produksi akan berdampak pada penurunan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Perusahaan akan lebih memilih untuk mengurangi jumlah permintaan tenaga kerja dan menggantikannya dengan teknologi padat modal, seperti mesin dan lainnya, untuk proses yang lebih efisien.

Upah minimum provinsi merupakan upah yang diterima pekerja dan harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja yang ditetapkan oleh pemerintah di suatu daerah. Sedangkan upah rata-rata provinsi adalah jumlah rata-rata upah minimum di seluruh provinsi (Statistik Indonesia, 2007). Kenaikan upah minimum bisa menyebabkan pengurangan penyerapan tenaga kerja apabila dilihat dari sisi permintaan tenaga kerja, oleh karenanya hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja secara teoritis diantaranya ditunjukkan oleh hukum okun, terdapat relasi negatif antara pengangguran dan Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam hal ini okun menyatakan jika terjadi penurunan dalam pengangguran sebesar 1 persen, maka akan mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan PDB mendekati 2 persen. Dengan kata lain, hukum okun menyatakan apabila PDB

meningkat sebesar 2 persen, maka akan terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja yang kemudian menurunkan angka pengangguran sebesar 1 persen (Mankiw 2012). Hal ini disebabkan penduduk yang bekerja berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa, sedangkan pengangguran tidak memberikan kontribusi. Okun mengungkapkan makin tinggi pengangguran, maka makin rendah tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara (Blanchard, 2011).

Tabel 1.1 Sektor Industri Pengolahan Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Pulau Jawa (persen), Tahun 2013-2015

Provinsi	Tahun		
	2013	2014	2015
Jawa Barat	43.22	43.64	43.07
Banten	37.30	34.70	33.52
Jawa Tengah	35.21	35.67	35.08
Jawa Timur	28.79	28.95	29.31
DI Yogyakarta	13.62	13.59	13.11
DKI Jakarta	13.54	13.57	13.80
P.Jawa	29.13	29.03	28.77

Sumber : BPS, PDRB Provinsi - Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha, 2013-2017

Pada tabel 1.3. dapat dilihat bahwa sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar terhadap total PDRB Jawa Barat dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Pulau Jawa yaitu selalu mencapai angka diatas 40 persen pada periode 2013-2015. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan merupakan sektor unggulan dari Provinsi Jawa Barat.

Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Barat menunjukkan tingkat pertumbuhan yang terus berada di atas laju pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 2013. Bahkan pada periode 2015 - 2016 perekonomian Jawa Barat tumbuh jauh di atas pertumbuhan perekonomian nasional. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tumbuh sebesar 5,03% lebih tinggi dibandingkan dengan

pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya tumbuh sebesar 4,79%, sedangkan di tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Jawa Barat bahkan tumbuh jauh lebih tinggi, diperkirakan akan mencapai 5,7% dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan hanya sebesar 5,1% .



Gambar 1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat dibandingkan Nasional

Sumber: BPS, BI, dan Proyeksi Tim Ekonomi Jawa Barat

Sumber utama pertumbuhan ekonomi Jawa barat masih disumbangkan oleh dua lapangan usaha utama di Jawa Barat, yaitu lapangan industri pengolahan dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran. Hingga triwulan II tahun 2016 Lapangan usaha industri pengolahan memberikan sumbangan sebesar 1,96% dari 5,76% pertumbuhan ekonomi yang terjadi atau bisa dikatakan bahwa sumbangan lapangan usaha industri pengolahan terhadap pertumbuhan di periode ini adalah sebesar 34,03%. Akan tetapi peran lapangan usaha industri pengolahan di tahun 2016 ini relatif menurun dibandingkan dengan di tahun 2015. Pada tahun 2015 peranan lapangan usaha industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa barat adalah sebesar 38,37% (atau sebesar 1,93% dari 5,03% pertumbuhan ekonomi

Jawa Barat tahun 2015).

Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan tingkat produksi. Karena pertumbuhan ekonomi mencerminkan kenaikan output maka semakin banyak barang atau jasa yang diproduksi akan diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Akan tetapi kompleksitas masalah tenaga kerja tidak hanya pada kuantitas tenaga kerja yang mampu diserap oleh perekonomian, namun masalah sesungguhnya adalah bagaimana kemampuan perekonomian dalam menyediakan kesempatan kerja berkualitas yang mampu memberikan harapan dan optimisme kehidupan bagi tenaga kerja yang terserap dan bekerja di sektor tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai **“Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Jumlah Industri berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan Jawa Barat?
2. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan Jawa Barat?
3. Apakah Upah Minimum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan Jawa Barat?

4. Manakah dari ketiga variabel yang mempengaruhi paling dominan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Jawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah Jumlah Industri berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui upah minimum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui manakah dari keempat variabel yang mempengaruhi paling dominan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Jawa Barat.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup wilayah dalam studi ini adalah Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan variabel satu terikat yaitu Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan dengan tiga variabel bebas yaitu Jumlah Industri, Upah Minimum Provinsi dan Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Industri, Upah Minimum Provinsi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan metode analisis regresi berganda. Data yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi

Jawa Barat.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam pemberi informasi mengenai Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran terhadap Penduduk Miskin di Kota Jakarta Timur, tahun 2006-2020.

b. Manfaat Teoritis

1. Sebagai informasi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Jawa Timur, khususnya Mahasiswa/I jurusan Ekonomi Pembangunan yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut
2. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai informasi tambahan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca dan sebagai referensi bagi kepentingan keilmuan yang berkaitan dengan Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran terhadap penduduk Miskin di Kota Jakarta Timur, tahun 2006-2020.